

SEJARAH PERALIHAN SWAPRAJA AMANUBAN MENJADI DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN DI BAWAH KEPEMIMPINAN KUSA NOPE TAHUN 1960-1972

Yuliati Merline Nabunome^{1*}, Malkisedek Taneo², Sarlota Naema Sipa³

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

*Corresponding email: yuliatinabu@gmail.com

Abstrak: Penghapusan sistem swapraja pada masa awal kemerdekaan mengubah tatanan pemerintahan tradisional di Timor Tengah Selatan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan latar belakang sejarah peralihan Swapraja Amanuban menjadi Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan di bawah kepemimpinan Kusa Nope tahun 1960-1972 serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian historis ini dilaksanakan di Niki-Niki, Amanuban Tengah, dengan informan yang ditentukan secara *purposive sampling*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan itu bagian dari kebijakan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Nomor 69 Tahun 1958, dan Kusa Nope menjadi bupati pertama melalui konsensus tiga raja. Peralihan mengubah sistem pemerintahan, hubungan masyarakat dengan penguasa, serta kewajiban adat, dan mendorong pembangunan, sedangkan nilai budaya tetap dipertahankan. Kepemimpinan Kusa Nope menjembatani pemerintahan tradisional dan modern.

Kata kunci: Sejarah, Peralihan, Swapraja Amanuban, Kusa Nope, Timor Tengah Selatan

Abstract: The abolition of the swapraja system in the early years of independence reshaped traditional governance in Timor Tengah Selatan. This study aims to describe the historical background of the transition of Swapraja Amanuban into the Second-Level Region of Timor Tengah Selatan under the leadership of Kusa Nope in 1960-1972 and its impact on society. This historical study was conducted in Niki-Niki, Central Amanuban, with informants chosen through *purposive sampling*. Data were gathered through interviews, observation, and document study, then analyzed through heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results show that the transition formed part of a national policy based on Laws Number 1 of 1957 and Number 69 of 1958, and that Kusa Nope became the first regent through a consensus among three kings. The transition changed governance, society-ruler relations, and customary obligations and encouraged development, while cultural values were preserved. Kusa Nope's leadership bridged traditional and modern government.

Keywords: History, Transition, Amanuban Swapraja, Kusa Nope, South Central Timor

PENDAHULUAN

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terletak di bagian tengah Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Soe sebagai ibu kota. Sebelum terintegrasi penuh ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah ini masih memelihara sistem pemerintahan tradisional bernama swapraja. Sistem tersebut merupakan warisan politik lokal masyarakat *Atoin Meto*, dengan pemerintahan yang dijalankan seorang *Usif* (raja) bersama perangkat adatnya. Swapraja mengatur kehidupan politik, hukum adat, dan tata sosial budaya. Di TTS terdapat beberapa swapraja besar, antara lain Amanuban, Amanatun, dan Mollo, yang masing-masing memiliki struktur pemerintahan adat dan kewibawaan sendiri. Keberadaan swapraja memperlihatkan bahwa masyarakat TTS telah memiliki pengelolaan sosial yang terorganisasi dan berakar pada tradisi sebelum pemerintahan modern hadir.

Hubungan swapraja dengan kekuasaan kolonial memiliki sejarah panjang. Sejak abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan *absentasi*, yaitu tidak banyak mencampuri wilayah pribumi, dan gagasan *rust en orde* (perdamaian dan ketertiban) tidak dijalankan di Timor. Haluan itu berubah pada awal abad ke-20, ketika Belanda melancarkan kampanye pasifikasi untuk menegakkan otoritasnya serta menghentikan perburuan kepala dan

perang antarkerajaan. Kampanye tersebut berdampak merusak bagi banyak penguasa lokal, termasuk runtuhnya Kerajaan Sonbay.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pusat berangsur-angsur memasukkan wilayah swapraja ke dalam struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum bagi pembubaran swapraja dan pembentukan daerah otonom. Prosesnya tidak selalu mulus. Elite lokal khawatir kehilangan kekuasaan, sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan sistem birokrasi yang baru. Kabupaten TTS terbentuk secara administratif melalui Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dan masa 1958-1960 menjadi masa penyesuaian dari sistem swapraja ke kabupaten. Pada 1960, Kusa Nope, yang berasal dari garis bangsawan Amanuban, mulai menjabat sebagai bupati definitif pertama.

Periode 1960-1972 menjadi masa transisi yang penting bagi Swapraja Amanuban. Di bawah kepemimpinan Kusa Nope, sistem kerajaan tradisional beralih menuju pemerintahan daerah modern yang ditandai terbentuknya Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan. Kusa Nope berperan sentral sebagai tokoh adat sekaligus penghubung antara masyarakat lokal dan kebijakan pemerintah pusat. Ia berupaya menyatukan berbagai unsur masyarakat, membangun infrastruktur, dan menjalankan program pembangunan dari pusat, sementara sistem adat dan birokrasi modern mulai saling bersentuhan. Perubahan itu berdampak pada bidang politik, pemerintahan, sosial, dan budaya, sebab masyarakat yang terbiasa dengan kepemimpinan genealogis harus menyesuaikan diri dengan birokrasi pemerintahan daerah.

Sejumlah kajian terdahulu menyentuh sisi lain sejarah swapraja di Nusa Tenggara Timur. Ollo (2015) meneliti karya dan prestasi Raja Pae Nope di Kerajaan Amanuban tahun 1920-1946, antara lain pemekaran kerajaan menjadi tujuh kefetoran, pembangunan sonaf, dan pembukaan jalan dari Kapan ke Niki-Niki. Mane (2019) mengkaji penggabungan Swapraja Nage dan Keo serta pembangunannya pada 1931-1958, sedangkan Bubun (2025) menelaah migrasi orang Ambenu dari Timor Portugis ke Swapraja Miomaffo pada 1911. Sipa (2024) menguraikan struktur pemerintahan kolonial di Zuid Midden Timor tahun 1905-1942, termasuk kedudukan Amanuban sebagai *zelfbestuur* di bawah pengawasan seorang *controleur*. Nope (2021) merekonstruksi perlawanan Raja Don Louis Nope II dari sudut pandang keluarga Dinasti Nope, sebuah perspektif emik yang bernilai tetapi menuntut sikap kritis karena potensi bias heroik. Taneo dkk. (2026) membahas Kerajaan Amanuban di bawah kepemimpinan Raja Kusa Nope pada tahun 1950-1958.

Kajian-kajian tersebut menyisakan celah. Sebagian besar berfokus pada masa kolonial atau pada swapraja lain, dan belum menelusuri bagaimana warisan struktural kolonial dihadapi, dimanfaatkan, serta diubah oleh aktor lokal setelah kerangka kolonial runtuh (Nope, 2021; Sipa, 2024). Fokus kajian itu berbeda dari peralihan Swapraja Amanuban menjadi Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan pada 1960-1972, sehingga peristiwa ini beserta dampaknya terhadap masyarakat masih memerlukan telaah tersendiri. Urgensinya bertambah karena peristiwa tersebut kini seakan terlupakan dan banyak generasi muda belum mengenal sejarah di tanahnya sendiri, padahal sejarah merupakan bagian dari identitas.

Berdasarkan latar belakang itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana latar belakang sejarah peralihan Swapraja Amanuban menjadi Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan di bawah kepemimpinan Kusa Nope tahun 1960-1972. Kedua, bagaimana dampak peralihan tersebut terhadap masyarakat Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kedua hal itu. Secara teoretis, hasilnya menambah pemahaman tentang sejarah peralihan ini. Secara praktis, hasilnya menjadi bahan informasi bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak lain bahwa nilai sejarah yang ditinggalkan dapat dijadikan aset budaya yang dijaga dan dilestarikan.

LANDASAN TEORI

Sejarah dipahami sebagai pengetahuan tentang peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, dengan manusia sebagai objek sekaligus subjeknya (Taneo & Mailani, 2024). Taneo dan Mailani (2024) membedakan tiga komponen, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sebagai kisah, dan sebagai ilmu yang bersifat diakronik. Kuntowijoyo (2005) memandang sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu atas dasar sumber, sedangkan Sjamsuddin (2007) menekankan tiga unsur sejarah, yakni manusia, ruang, dan waktu. Dalam penelitian ini, kepemimpinan Kusa Nope pada peralihan 1960-1972 menjadi peristiwa yang dikaji, rekonstruksinya disusun dari fakta yang telah diverifikasi, dan prosesnya mengikuti metode sejarah yang sistematis.

Peralihan berarti proses perubahan dari satu keadaan atau sistem menuju keadaan lain. Soekanto (2002) mengaitkannya dengan penyesuaian masyarakat dari pola lama ke pola baru. Soemardjan (1982) menunjuk perubahan pada lembaga sosial yang memengaruhi nilai, sikap, dan pola perilaku, dan perubahan itu dapat berlangsung perlahan (evolutif) maupun cepat (revolutif). Sztompka (2004) memandangnya sebagai transformasi struktur sosial, nilai, dan sistem budaya yang berjalan terus-menerus.

Swapraja adalah daerah yang berhak mengatur dirinya sendiri dalam kerangka kekuasaan yang lebih besar, dengan pemerintahan sehari-hari dijalankan raja atau penguasa tradisional yang diakui secara hukum oleh pemerintah kolonial (Soehino, 1996). Van Vollenhoven (1933) melihatnya sebagai *zelfbestuur* yang dilembagakan Belanda untuk memudahkan pengendalian wilayah. Koentjaraningrat (2004) menambahkan bahwa swapraja bukan sekadar wilayah administratif, melainkan lembaga sosial budaya yang memuat struktur pemerintahan tradisional, aturan adat, dan hubungan patron-klien antara raja dan rakyat.

Kepemimpinan diartikan sebagai proses memengaruhi orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan bersama (Terry, 2006; Yukl, 2010), dengan penekanan pada kemampuan mengarahkan pikiran, perasaan, dan perilaku pengikut (Kartono, 2008). Stogdill (1974) merumuskannya sebagai proses memengaruhi aktivitas kelompok terorganisasi dalam menentukan dan mencapai tujuan. Dampak, pada sisi lain, adalah perubahan dalam kehidupan sosial akibat interaksi sosial, tindakan manusia, atau kebijakan tertentu, yang dapat bersifat langsung maupun tidak langsung (Soekanto, 2006).

METODE

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis, yaitu cara mengkaji peristiwa dan fakta masa lampau (Suprpto, 2013), dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian (Nasution, 2003). Lokasi penelitian mencakup seluruh wilayah bekas Kerajaan Amanuban yang berpusat di Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lokasi ini dipilih karena pusat Swapraja Amanuban berada di Niki-Niki, di sana terdapat informan yang dapat dipercaya, dan di sana pula terdapat bukti sejarah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Informan dan Sumber Data

Informan ditentukan melalui *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti sifat atau ciri yang telah diketahui sebelumnya (Sugiyono, 2009). Informan adalah orang yang dimintai informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2002). Kriteria yang digunakan mencakup keturunan Raja Kusa Nope, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat sekitar yang mengetahui peristiwa yang diteliti. Tiga informan yang diwawancarai tersaji pada Tabel 1, dan dokumentasi wawancara dengan Pina Ope Nope serta Ady Yacob Nope bertanggal 18 Juni 2026.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama informan	Usia	Status
1	Pina Ope Nope	46 tahun	Keturunan raja
2	Ady Yacob Nope	36 tahun	Keturunan raja
3	Drs. Adrian H. A. Pentury, M.Si.	50 tahun	Kepala Badan Pemerintahan Setda Kabupaten TTS

Sumber: Data penelitian (2026).

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, serta dari arsip atau tulisan sejarah tentang swapraja (Sugiyono, 2009). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan peralihan Swapraja Amanuban.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data memakai tiga teknik. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan peneliti dan berbentuk wawancara mendalam sekaligus terbuka, sehingga informan leluasa berargumen dan tidak dibatasi jawaban ya atau tidak. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung bukti yang berkaitan dengan peralihan Swapraja Amanuban (Morissan, 2017). Studi dokumen menelaah foto, arsip, literatur, jurnal, dan laporan penelitian yang terkait (Herdiansyah, 2009).

Data dianalisis dengan analisis historis, yang mengutamakan ketajaman dan kekuatan dalam menafsirkan data sejarah (Kartodirdjo, 1982). Analisis meliputi empat tahap. Heuristik adalah pencarian dan pengumpulan sumber yang relevan (Abdillah, 2012; Daliman, 2012). Verifikasi atau kritik sumber menguji keaslian dan kredibilitas sumber (Suhartono, 2010) melalui kritik eksternal terhadap aspek luar sumber dan kritik internal terhadap isi serta kredibilitas informasi narasumber. Interpretasi menafsirkan fakta yang terkumpul dengan membandingkan, menghubungkan, dan mensintesiskannya dengan konsep yang telah dikaji. Historiografi, sebagai tahap akhir, memaparkan hasil dalam bentuk tulisan sejarah (Ismaun, 2005), yang pada penelitian ini berbentuk deskriptif naratif secara kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan menurut dua rumusan masalah. Setiap bagian diikuti pembahasan yang menghubungkan temuan dengan konteks sejarah dan kajian terdahulu.

Latar Belakang Sejarah Peralihan Swapraja Amanuban Menjadi Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan di Bawah Kepemimpinan Kusa Nope Tahun 1960-1972

Pemerintahan tradisional dan kedudukan Swapraja Amanuban

Wilayah bekas Swapraja Amanuban kini mencakup dua belas kecamatan, yaitu Amanuban Timur, Amanuban Tengah, Amanuban Selatan, Amanuban Barat, Kuanfatu, Kualin, Noebeba, Kuantana, Batu Putih, Oenino, Ki'e, dan Kota Soe. Amanuban hanyalah satu dari lima kerajaan di kawasan ini, bersama Oenam (yang kemudian menjadi Mollo), Onam atau Amanatun, Anas, dan Nenometa. Kelima kerajaan yang telah berdiri beberapa abad itu berubah menjadi daerah swapraja ketika dikuasai Hindia Belanda, lalu melebur ke dalam Kabupaten TTS setelah Indonesia merdeka. Nama-nama kerajaan tersebut masih dikenal masyarakat melalui nama kecamatan.

Kerajaan Amanuban secara resmi berdiri pada abad ke-17 oleh leluhur keluarga Nope sebagai gabungan kesatuan suku (*clan*) yang telah ada sebelumnya, antara lain di Tunbesi (Nuban atau Nubatonis, Tesnai, Asbanu, dan Nomnafa), di Abi (Tkesnai), dan di Neto (Am Abi). Setiap kesatuan dipimpin seorang kepala suku yang disebut *amaf* (Wadu dkk., 2003).

Pemerintahan adat Amanuban bersifat genealogis. *Usif* (juga disapa *A Finit*) menempati kedudukan tertinggi, dan jabatannya diwariskan turun-temurun. Di bawahnya terdapat para *amaf*, marga pendukung utama raja, yang di Niki-Niki berasal dari marga Nope, Tamelab, dan Nabuasa. Perangkat lain meliputi *meob* yang menjaga keamanan dan ketenteraman wilayah,

ana' a tobe yang berwenang atas kelestarian alam, serta *mnais kuan*, yakni tetua kampung atau pemangku adat yang keberadaannya disepakati para *amaf* (Kamlasi, 2026).

Struktur adat itu berada dalam kerangka pemerintahan kolonial. Belanda memasuki pedalaman Timor di Molo pada 1905, mengalahkan para *meo* (prajurit) Molo, Amanuban, dan Amanatun, lalu membentuk *onderafdeling Zuid Midden Timor* beribu kota Molo. Amanuban beroperasi sebagai *zelfbestuur* di bawah pengawasan seorang *controleur* dalam sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*) hingga berakhirnya kekuasaan Belanda pada 1942 (Sipa, 2024). Perlawanan Raja Don Louis Nope II terhadap kekuatan kolonial turut membentuk legitimasi Dinasti Nope yang tidak semata-mata bersumber dari struktur administratif kolonial (Nope, 2021).

Gambaran ini menjelaskan mengapa peralihan pada 1958-1972 tidak berarti lenyapnya otoritas elite lama begitu saja. Swapraja bukan hanya satuan administratif, melainkan lembaga sosial budaya (Koentjaraningrat, 2004), sehingga legitimasi adat dapat bertahan meskipun status hukum swapraja berubah.

Kebijakan nasional dan dasar hukum Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan

Negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat berturut-turut menggabungkan diri dengan Republik Indonesia pada 1950 (Widiyatmika, 2007). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 kemudian menjadi landasan hukum pembubaran swapraja dan pembentukan daerah otonom, dan diikuti Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 yang menetapkan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Ottu dkk., 2025).

Kabupaten TTS terbentuk secara *de jure* pada 14 Agustus 1958, yakni tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122). Kabupaten ini sah secara *de facto* pada 20 Desember 1958, bertepatan dengan peresmian provinsi dan kabupaten se-Nusa Tenggara Timur. Daerah Tingkat II TTS beribu kota Soe dan meliputi bekas tiga swapraja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Mollo (Ottu dkk., 2025). Pemerintahan swapraja baru berakhir secara *de facto* pada 1962, ketika Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur menetapkan Surat Keputusan Nomor Pem.66/1/2 tanggal 28 Februari 1962, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor Pem.66/1/33 tanggal 9 Juni 1962 tentang pembentukan kecamatan dalam Daerah Swatantra Tingkat II se-Nusa Tenggara Timur (Ottu dkk., 2025).

Rentang waktu antara kelahiran kabupaten pada 1958, pengangkatan bupati definitif pada 1960, dan berakhirnya pemerintahan swapraja secara *de facto* pada 1962 menunjukkan bahwa peralihan berlangsung bertahap, sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Soemardjan (1982) membedakan perubahan evolutif dan revolutif, dan pengalaman Amanuban lebih dekat pada pola yang pertama: status hukum berubah lebih dahulu, sedangkan praktik pemerintahan menyesuaikan kemudian.

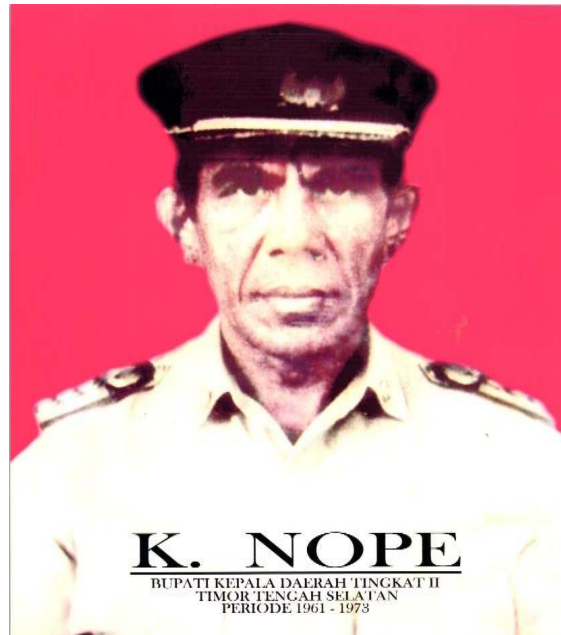
Pergantian kepemimpinan Amanuban dan jalan Kusa Nope menuju pemerintahan daerah

Menurut Pina Ope Nope, keturunan raja, peralihan kepemimpinan di Amanuban bermula ketika salah seorang putra Raja Pae Nope melaporkan ayahnya kepada pihak Belanda karena dituduh membanting dan meludahi foto Ratu Wilhelmina (P. O. Nope, wawancara pribadi, 18 Juni 2026). Tindakan itu dianggap menghina lambang negara. Belanda memaksa Pae Nope melepaskan jabatan untuk menjalani proses hukum selama enam bulan, dan kekuasaan raja diserahkan kepada Johan Paulus Nope (Liu Nope) pada 1946-1949. Jabatan itu disebut *kartikel pertama* atau *kartikil satu*, sebutan lokal bagi pemangku raja atau penjabat sementara.

Pada 1949 beredar kabar bahwa Johan Paulus Nope sakit. *Kontroleur* kemudian menunjuk saudara tirinya, Kusa Nope, sebagai pemangku raja kedua, dengan pertimbangan latar belakang pendidikan modern dan pengalamannya sebagai Feter Noebeba. Masyarakat tetap menganggap Pae Nope sebagai raja menurut adat, sedangkan urusan administrasi dan surat-menyurat dengan Belanda dijalankan Kusa Nope. Perbedaan itu melahirkan dua sebutan:

Pae Nope sebagai *Uis Amnanut* dan Kusa Nope sebagai *Usi Sukif*. Kusa Nope selanjutnya menjabat Kepala Daerah Swapraja pada masa awal kemerdekaan hingga penghapusan sistem kerajaan pada 1962 (P. O. Nope, wawancara pribadi, 18 Juni 2026). Potretnya sebagai kepala daerah tersaji pada Gambar 1.

Dua legitimasi yang berjalan berdampingan ini patut dicermati. Kusa Nope memegang legitimasi administratif dari pemerintah, sementara legitimasi adat tetap melekat pada garis Pae Nope. Pengangkatannya memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial menimbang kecakapan administratif, yakni pendidikan modern dan pengalaman pemerintahan, dan tidak hanya garis keturunan.



Gambar 1. Kusa Nope sebagai Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan

Peralihan Kusa Nope dari raja menjadi bupati pertama TTS, menurut Ady Yacob Nope, ditempuh melalui konsensus tiga raja: Kolo Banunaek dari Amanatun, Tua Sonbay dari Mollo, dan Kusa Nope dari Amanuban (A. Y. Nope, wawancara pribadi, 18 Juni 2026). Kusa Nope memimpin lebih dahulu karena wilayah Amanuban lebih luas, ia berlatar belakang pendidikan modern, dan ia memiliki hubungan baik dengan Presiden Soekarno. Kedua kerajaan lain tetap berwenang memimpin kabupaten secara bergiliran, dengan urutan berikutnya Mollo dan Amanatun.

Akhir kepemimpinan Kusa Nope, menurut informan yang sama, dipengaruhi dinamika politik. Pada pemilihan umum pertama, Menteri Dalam Negeri menjanjikan di hadapan para kepala daerah bahwa kepala daerah di kabupaten tempat Golkar menang akan menjabat seumur hidup. Kusa Nope menyatakan kesanggupan memenangkan Golkar, dan Golkar menang 99,96% di TTS. DPR kemudian mengajukan surat agar Kusa Nope ditetapkan sebagai bupati seumur hidup. Surat itu, menurut informan, tidak sampai kepada Menteri Dalam Negeri karena Kusa Nope merupakan lawan politik Gubernur El Tari, yang lalu memproses Cornelis Tapatab, wakil Mollo, sebagai penggantinya. Keterangan ini bersumber dari satu informan dan, sesuai kaidah kritik sumber, memerlukan peneguhan melalui arsip pemerintahan.

Tabel 2. Kronologi Peralihan Swapraja Amanuban Menjadi Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan

Waktu	Peristiwa	Sumber
Abad ke-17	Kerajaan Amanuban berdiri oleh leluhur keluarga Nope	Wadu dkk. (2003)
1946-1949	Johan Paulus Nope (Liu Nope) memangku jabatan raja setelah Pae Nope menjalani proses hukum	P. O. Nope (wawancara)
1949	Kontrolleur mengangkat Kusa Nope sebagai pemangku raja; ia dikenal sebagai <i>Usi Sukif</i>	P. O. Nope (wawancara)
14 Agustus 1958	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958: Kabupaten TTS terbentuk secara <i>de jure</i>	Ottu dkk. (2025)
20 Desember 1958	Kabupaten TTS sah secara <i>de facto</i> bersamaan dengan peresmian provinsi dan kabupaten se-NTT	Ottu dkk. (2025)
1958-1960	Masa penyesuaian kepemimpinan dari sistem swapraja ke kabupaten	Temuan penelitian
1960	Kusa Nope mulai menjabat bupati definitif pertama TTS	Temuan penelitian
1962	Pemerintahan swapraja berakhir secara <i>de facto</i> (SK Gubernur NTT, 28 Februari dan 9 Juni 1962)	Ottu dkk. (2025)
1972	Masa jabatan Kusa Nope berakhir; digantikan Cornelis Tapatab, wakil Mollo	A. Y. Nope (wawancara)

Sumber: Diolah dari data penelitian (2026).

Temuan di atas menunjukkan bahwa peralihan di TTS tidak digerakkan satu faktor saja. Kebijakan pusat memberi dasar hukum, kesepakatan antarkerajaan menentukan siapa yang memimpin lebih dahulu, dan dinamika politik provinsi serta nasional memengaruhi keberlanjutan kepemimpinan, sehingga mekanisme pergiliran yang disepakati tidak sepenuhnya terwujud. Kepemimpinan Kusa Nope, dalam pengertian kemampuan memengaruhi dan memfasilitasi kerja sama mencapai tujuan bersama (Terry, 2006; Yukl, 2010), tampak pada perannya sebagai penghubung antara kerajaan-kerajaan yang berbeda kepentingan dan pemerintah pusat. Ia ibarat jembatan yang menghubungkan dua tepian, pemerintahan tradisional dan pemerintahan modern, sehingga integrasi ke dalam NKRI berlangsung damai.

Dampak Peralihan Swapraja Amanuban Menjadi Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan terhadap Masyarakat

Peralihan mengubah struktur pemerintahan dari sistem swapraja menjadi pemerintahan daerah yang mengikuti ketentuan negara. Ringkasan dampak menurut bidang tersaji pada Tabel 3. Perubahan itu menjalar ke kehidupan masyarakat di bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Pada masa Kusa Nope, penyesuaian dilakukan melalui penataan organisasi pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Perubahan sistem pemerintahan dan hubungan penguasa dengan rakyat

Dampak paling mendasar adalah pergeseran struktur kekuasaan dari monarki tradisional yang berbasis hubungan genealogis dan adat menuju birokrasi modern yang berlandaskan lembaga administratif negara (P. O. Nope, wawancara pribadi, 18 Juni 2026). Raja tidak lagi menjadi penguasa tertinggi, melainkan beralih menjadi kepala daerah yang bekerja menurut peraturan perundang-undangan. Tiga swapraja besar, yakni Amanuban, Mollo, dan Amanatun, kini terintegrasi dalam satu kesatuan administrasi di bawah seorang bupati (A. H. A. Pentury, wawancara pribadi, 2026), dan peran DPRD serta perangkat birokrasi dalam pengambilan keputusan politik menguat.

Pola hubungan antara pemimpin dan masyarakat ikut berubah. Sebelum peralihan, raja menjadi pusat legitimasi adat, tempat masyarakat mengadukan persoalan sosial, hukum, dan konflik melalui hubungan yang bersifat personal, adat, dan kekerabatan. Setelah lembaga pemerintahan dan peradilan negara terbentuk, persoalan semacam itu dialihkan ke lembaga tersebut, sehingga hubungan menjadi administratif dan formal. Pina Ope Nope menyatakan

bahwa masyarakat tidak lagi terikat secara moril kepada raja seperti pada masa kerajaan (P. O. Nope, wawancara pribadi, 18 Juni 2026).

Kewajiban adat dan perubahan ekonomi

Peralihan menghapus kewajiban adat kepada raja. Masyarakat tidak lagi menyerahkan *maus* (upeti), *etu* (kebun-kebun raja di setiap ketemukungan) tidak lagi digarap rakyat, dan *pusuf* (ternak raja yang dibagikan kepada rakyat di tiap ketemukungan) tidak lagi dikelola dengan pola lama (P. O. Nope, wawancara pribadi, 18 Juni 2026). Kusa Nope mendorong modernisasi dengan meminta rakyat berhenti melakukan *tofa etu*, praktik yang berkaitan dengan kebun raja. Sebagian masyarakat tetap berinisiatif mengerjakan *etu* sendiri dan menyerahkan sebagian hasilnya kepada kerajaan (A. Y. Nope, wawancara pribadi, 18 Juni 2026).

Bagi perekonomian, penghapusan kewajiban tersebut memberi kebebasan lebih besar kepada masyarakat untuk mengelola hasil pertaniannya. Pemerintah daerah pada saat yang sama mulai mengarahkan pembangunan ekonomi melalui pertanian, peternakan, dan perdagangan demi meningkatkan kesejahteraan. Peran kerajaan dalam kehidupan masyarakat pun berangsur digantikan oleh sistem pemerintahan daerah.

Pendidikan, kesehatan, dan pembangunan: peran Kusa Nope

Pada awal pembentukan kabupaten, fasilitas pemerintahan sangat terbatas. Menurut Ady Yacob Nope, pemerintah pusat belum memiliki anggaran untuk membangun sekolah, menggaji pegawai, dan mendirikan kantor pemerintahan di daerah. Dalam keadaan itu, Kusa Nope mengambil inisiatif membiayai pembangunan sekolah dan membayar pegawai negeri di TTS (A. Y. Nope, wawancara pribadi, 18 Juni 2026). Beberapa narasumber juga menyatakan bahwa keluarga Kusa Nope turut mendukung pembangunan sekolah dan membantu pembiayaan pendidikan pada masa awal kabupaten. Pembentukan kabupaten membuka peluang bagi peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan: sekolah mulai ditingkatkan, dan pemerintah memperluas pelayanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas serta penempatan tenaga kesehatan, sehingga pelayanan lebih terorganisasi dibandingkan masa swapraja.

Pembangunan infrastruktur berjalan lebih terarah. Pemerintah daerah mulai membangun kantor pemerintahan, jalan penghubung antarkecamatan, jembatan, sarana pendidikan, dan fasilitas pelayanan masyarakat, yang memperlancar mobilitas dan distribusi hasil pertanian.

Keberlanjutan nilai budaya dan lembaga adat

Sistem swapraja dihapus, tetapi nilai adat dan budaya Amanuban tetap dipertahankan. Raja kehilangan kekuasaan politik, tetapi tetap dihormati sebagai tokoh adat yang berperan dalam upacara adat, penyelesaian sengketa adat, dan pelestarian tradisi. Peralihan itu membatasi fungsi politik kerajaan dan mempertahankan fungsi adatnya, selaras dengan pandangan bahwa swapraja merupakan lembaga sosial budaya (Koentjaraningrat, 2004).

Kesinambungan tersebut masih tampak pada kondisi masyarakat bekas wilayah Amanuban masa kini. Lembaga adat bekerja bersama pemerintah kelurahan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta masih berperan dalam penyelesaian persoalan dan pelaksanaan upacara adat. Bahasa Dawan (*Uab Meto*) tetap menjadi bahasa ibu dalam musyawarah adat dan tuturan adat (*naton*), berdampingan dengan bahasa Indonesia untuk urusan formal. Tenun ikat dipertahankan sebagai pakaian adat dan bagian dari belis (*mas kawin*).

Tabel 3. Ringkasan Dampak Peralihan Swapraja Amanuban menurut Bidang

Bidang	Sebelum atau pada awal peralihan	Setelah peralihan
Pemerintahan dan politik	Raja memegang kekuasaan tertinggi; tiga swapraja berdiri terpisah	Pemerintahan daerah dalam sistem administrasi NKRI; tiga swapraja dalam satu kabupaten; peran DPRD dan birokrasi menguat
Ekonomi	Kewajiban adat berupa <i>maus</i> , <i>etu</i> , dan <i>pusuf</i>	Kewajiban adat dihapus; masyarakat lebih bebas mengelola hasil pertanian; pertanian, peternakan, dan perdagangan dikembangkan
Sosial	Masyarakat mengadu kepada raja; hubungan bersifat adat dan kekeluargaan	Persoalan dibawa ke lembaga pemerintahan dan peradilan; hubungan menjadi administratif
Budaya	Raja sebagai pusat legitimasi adat	Raja menjadi tokoh adat yang dihormati; nilai dan lembaga adat dipertahankan
Pendidikan dan kesehatan	Pusat belum menganggarkan sekolah dan gaji pegawai; layanan kesehatan kurang terorganisasi	Sekolah dibangun dan ditingkatkan dengan dukungan Kusa Nope dan keluarganya; fasilitas serta tenaga kesehatan ditambah
Pembangunan	Fasilitas pemerintahan sangat terbatas pada awal kabupaten	Kantor pemerintahan, jalan, jembatan, dan sarana umum dibangun

Sumber: Diolah dari data penelitian (2026).

Secara keseluruhan, peralihan itu lebih dari pergantian bentuk pemerintahan. Sumber otoritas bergeser dari garis keturunan ke hukum negara, hubungan raja dan rakyat berubah dari ikatan adat menjadi hubungan pemerintah dan warga, dan sebagian beban ekonomi masyarakat beralih dari kewajiban adat ke pembangunan daerah. Adat tidak lenyap. Ia bergeser dari ranah politik ke ranah budaya, sejalan dengan pandangan Soemardjan (1982) bahwa perubahan pada lembaga sosial memengaruhi pola perilaku tanpa harus meniadakan seluruh nilai yang ada.

SIMPULAN

Latar belakang peralihan Swapraja Amanuban menjadi Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus sistem swapraja dan membentuk pemerintahan daerah yang lebih terintegrasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Di TTS, peralihan berlangsung damai melalui kesepakatan tiga raja, yaitu Kusa Nope dari Amanuban, Kolo Banunaek dari Amanatun, dan Tua Sonbay dari Mollo. Berdasarkan musyawarah itu, Kusa Nope dipercaya menjadi bupati pertama karena wilayah Amanuban paling luas, ia memiliki pengalaman kepemimpinan dan pendidikan yang baik, serta menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat. Kepemimpinannya menjembatani pemerintahan tradisional dan modern sehingga integrasi ke dalam NKRI berjalan baik.

Peralihan tersebut berdampak luas. Dalam bidang politik dan pemerintahan, monarki tradisional beralih menjadi pemerintahan daerah berbirokrasi modern. Dalam bidang sosial, raja tidak lagi memegang kekuasaan pemerintahan dan menjadi tokoh adat yang dihormati. Dalam bidang budaya, nilai dan lembaga adat dipertahankan. Dalam bidang ekonomi dan pembangunan, kepemimpinan Kusa Nope memberi kontribusi melalui pembangunan sarana umum dan dukungan terhadap pendidikan, serta mendorong masyarakat meninggalkan kewajiban adat yang menghambat ekonomi, seperti *tofa etu*. Peralihan itu mengubah struktur pemerintahan sekaligus mendorong modernisasi tanpa menghapus nilai budaya lokal.

Temuan ini bertumpu pada tiga informan dan sejumlah dokumen, sehingga penelitian lanjutan perlu melengkapi data, terutama arsip pemerintahan masa 1960-1972. Tua adat, tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan sekolah juga didorong menjaga bukti peninggalan serta memperkenalkan sejarah ini kepada generasi muda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para informan serta dinas dan instansi terkait yang telah memberikan keterangan dan rekomendasi penelitian, dan kepada dosen pembimbing, Prof. Dr. Drs. Malkisedek Taneo, M.Si. dan Sarlota Naema Sipa, S.Pd., M.Hum., atas bimbingan dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. (2012). *Pengantar ilmu sejarah*. Pusaka Setia.
- Bubun, J. O. P. (2025). *Sejarah migrasi orang Ambenu dari Timor Portugis ke Swapraja Miomaffo pada tahun 1911*.
- Daliman, A. (2012). *Metode penelitian sejarah*. Ombak.
- Herdiansyah, H. (2009). *Metode penelitian kualitatif*. Salemba Humanika.
- Ismaun. (2005). *Sejarah sebagai ilmu*. Historia Utama Press.
- Kamlasi, Y. (2026). *Sejarah Kefetoran Noebone pada masa pemerintahan Fetoer Ae Kobi Nitbani tahun 1930-1962*. Universitas Nusa Cendana.
- Kartodirdjo, S. (1982). *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia*. Gramedia.
- Kartono, K. (2008). *Pimpinan dan kepemimpinan* (Edisi pertama). Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Mane, M. L. (2019). *Penggabungan Swapraja Nage dan Keo serta pembangunannya pada tahun 1931-1958*.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2017). *Metode penelitian survei*. Kencana.
- Nasution. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Tarsito.
- Nope. (2021). *Usi (Raja) Don Louis Nope II, pejuang Timor yang tak terhalahkan: Sejarah perlawanan Amanuban menentang kolonialisme Belanda, Inggris, dan Portugis*. Citra Airiz.
- Olo, O. (2015). *Karya dan prestasi Raja Pae Nope di Kerajaan Amanuban tahun 1920-1946*. Universitas Nusa Cendana.
- Ottu, M. D. I., dkk. (2025). *Transformasi pemerintahan desa dari temukung ke desa gaya baru*. PT Adab.
- Sipa, S. N. (2024). *Zuid Miden Timor: Pusat pemerintahan Belanda di pedalaman Pulau Timor tahun 1905-1942*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Ombak.
- Soehino. (1996). *Ilmu negara*. Liberty.
- Soekanto, S. (2002). *Teori peranan*. Bumi Aksara.
- Soemardjan, S. (1982). *Perubahan sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Stogdill, R. M. (1974). *Handbook of leadership: A survey of theory and research*. The Free Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartono. (2010). *Teori dan metodologi sejarah*. Graha Ilmu.
- Suprpto. (2013). *Metodologi penelitian ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial*. CAPS.
- Sztompka, P. (2004). *Sosiologi perubahan sosial*. Prenada Media.
- Taneo, M., & Mailani, N. M. (2024). *Pengantar ilmu sejarah*. Tangguh Denara Jaya.
- Taneo, V. K., Taneo, M., & Sipa, S. N. (2026). *Sejarah Kerajaan Amanuban di bawah kepemimpinan Raja Kusa Nope tahun 1950-1958*. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-prinsip manajemen*. Bumi Aksara.

- Van Vollenhoven, C. (1933). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. E. J. Brill.
- Wadu, J., dkk. (2003). *Sejarah pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Universitas Nusa Cendana.
- Widiyatmika, M. (2007). *Lintasan sejarah Bumi Cendana*. Pusat Pengembangan Madrasah NTT.
- Yukl, G. (2010). *Kepemimpinan dalam organisasi*. Indeks.